

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBUKUAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROGRAM KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan investasi berbasis teknologi informasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMA	Rp 1,292,704,000,000.00	Rp 629,183,427,836.00	Realisasi investasi yang disampaikan merupakan data sampai triwulan III	Data realisasi investasi akan diperbarui pada triwulan IV
					Nilai Investasi PMDN	Rp 587,349,000,000.00	Rp 129,545,866,740.00		
			2. Peningkatan promosi potensi peluang investasi	Kegiatan Penebaran Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebijakan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen		
			3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
			4. Pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas 1M	281 Proyek	440 Proyek		
			5. Optimalisasi penerapan standar operasional prosedur (SOP) pada unit pelayanan	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Event Promosi	1 event	1 event		
			6. Menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
			7. Percepatan penyelenggaraan Mail Pelayanan Publik (MPP).	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase permohonan perizinan yang dilayani	100%	100%		
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase cakupan layanan perizinan berusaha kewenangan kabupaten	100%	100%		
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3377 Dokumen	14913 Dokumen		

			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha		
			Pemediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	51 Pelaku Usaha		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Perusahaan Wajib Laporan LKPM yang Melapor	36,69%	28,86%	Data Keputuhan merupakan data sampai dengan triwulan III	Data akan dioperasikan pada triwulan IV
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	3 Dokumen	3 Dokumen		
			Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	225 Pelaku Usaha	232 Pelaku Usaha		
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan Usaha		
			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	14 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha		

